

## Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Saat Terjadinya Covid-19 Terhadap Laju Perekonomi di Indonesia Tahun 2020-2022

Jennifer Kayla Esfandiary<sup>1</sup>, Fanny Liu<sup>2</sup>, Salsa Putri Nabila<sup>3</sup>, Ferdinandus Kaki Rangga<sup>4</sup>, M. Ivan Julianto<sup>5</sup>, Mustaqim<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

e-mail: [esfandiaryjenny@gmail.com](mailto:esfandiaryjenny@gmail.com)<sup>1</sup>, [fannyliu1515@gmail.com](mailto:fannyliu1515@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[salsaputrinabila97@gmail.com](mailto:salsaputrinabila97@gmail.com)<sup>3</sup>, [igorrangga03@gmail.com](mailto:igorrangga03@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[mhmmdivann@gmail.com](mailto:mhmmdivann@gmail.com)<sup>5</sup>, [mustaqimsh@yahoo.com](mailto:mustaqimsh@yahoo.com)<sup>6</sup>

### Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menguraikan mengenai Dampak Hadirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Saat Terjadinya COVID-19 Terhadap Laju Perekonomi di Indonesia Tahun 2020-2022. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode normatif dalam hukum. Pandemi COVID-19 telah mengubah lanskap ekonomi global, termasuk di Indonesia. Tindakan pencegahan seperti pembatasan sosial berskala besar telah diimplementasikan untuk mengendalikan penyebaran virus. Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam sektor ekonomi akibat dari pembatasan sosial. Aktivitas ekonomi utama seperti perdagangan, pariwisata, dan manufaktur terpukul parah. Namun, hadirnya pembatasan sosial berskala besar selama pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022, terlihat adanya indikasi pemulihan yang lebih kuat, dimana perekonomian Indonesia menunjukkan tanda-tanda stabilisasi dan pertumbuhan yang lebih kuat, terutama dengan menguatnya investasi asing. Meskipun mengalami penurunan awal yang tajam, adopsi kebijakan stimulus dan adaptasi sektor ekonomi telah membantu dalam memulihkan dan membangun ketahanan ekonomi di masa yang akan datang.

**Kata kunci:** *Covid-19, Pandemi, Perekonomian, Investasi, Stabilitas*

### Abstract

The purpose of this article is to examine and elaborate on the Impact of the Implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) During the COVID-19 Outbreak on the Economic Growth in Indonesia from 2020 to 2022. This article is crafted using a normative legal method. The COVID-19 pandemic has altered the global economic landscape, including in Indonesia. Preventive measures such as large-scale social restrictions have been implemented to control the spread of the virus. Indonesia has experienced a significant decline in the economic sector due to social restrictions. Key economic activities such as trade, tourism, and manufacturing have been severely affected. However, the presence of large-scale social restrictions during the COVID-19 pandemic has had a significant impact on Indonesia's economy. In 2022, there are indications of a stronger recovery, where the Indonesian economy shows signs of stabilization and stronger growth, especially with the strengthening of foreign investments. Despite the sharp initial decline, the adoption of stimulus policies and the adaptation of the economic sector have contributed to the recovery and the building of economic resilience in the future.

**Keywords :** *Covid-19, Pandemic, Economy, Investment, Stability*

## PENDAHULUAN

Sejak munculnya kasus pertama COVID-19 di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Pandemi dimaknai sebagai wabah yang menjangkit bersamaan di manamana meliputi daerah geografi yang luas. Atau bisa disebut juga dengan penyakit yang menyebar bersamaan keberbagai negara di dunia. Di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dilaporkan kasus positif COVID-19 yang pertama dan penyelidikan sedang berlangsung untuk mempelajari virus ini lebih lanjut. Pada Maret 2020 ini, pemerintah Indonesia dihadapkan pada keputusan sulit untuk memitigasi penyebaran virus dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar, termasuk lockdown wilayah, penutupan bisnis, dan pembatasan pergerakan. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi dalam sektor kesehatan, tetapi juga mempengaruhi secara signifikan aktivitas ekonomi. Sejumlah besar perusahaan, terutama di sektor perdagangan, pariwisata, dan manufaktur, mengalami penurunan produksi dan pendapatan yang diperoleh secara drastis. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya berkembang pesat menjadi melambat bahkan mengalami kontraksi. Pemerintah Indonesia segera merespons dengan merancang berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk bantuan sosial dan keringanan pajak. Tujuannya adalah untuk memitigasi dampak negatif pada daya beli masyarakat dan mempertahankan stabilitas ekonomi. Selain itu, perubahan dalam pola konsumsi dan perilaku bisnis juga menjadi fenomena menarik selama periode ini.

Seiring berjalannya waktu, perubahan ini memberikan gambaran tentang adaptabilitas dan ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara sektor-sektor tradisional terus berjuang, sektor-sektor baru seperti teknologi dan e-commerce mulai menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Oleh karena itu, analisis dampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap laju perekonomian Indonesia selama periode 2020-2022 menjadi penting untuk memahami evolusi dan pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman ini untuk mempersiapkan masa depan. Selain itu, adaptasi terhadap era digital juga menjadi sorotan penting selama periode ini. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi dan platform digital, banyak perusahaan dan individu di Indonesia mulai menggeser aktivitas mereka ke ranah online. E-commerce, layanan pengiriman makanan, dan platform pembelajaran daring berkembang pesat sebagai respons terhadap pembatasan fisik. Tak hanya itu, perubahan perilaku konsumen juga menjadi aspek yang menarik untuk diamati. Masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam pengeluaran dan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan primer. Pada sisi positif, situasi ini juga mempercepat inovasi dan transformasi digital di sektor-sektor yang sebelumnya belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi. Perusahaan-perusahaan terpaksa mencari solusi kreatif untuk beroperasi dan menghadapi tantangan baru. Namun, sumber daya manusia juga mengalami tekanan signifikan selama periode ini.

Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan jam kerja, yang mengakibatkan penurunan pemasukan ekonomi bagi banyak keluarga di seluruh Indonesia. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi perekonomian Indonesia selama pandemi COVID-19 dan membantu dalam merencanakan langkah-langkah kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi krisis serupa di masa depan.

Dari berbagai hal di atas dapat dirumuskan berbagai masalah, yaitu apakah perubahan perilaku konsumen mempengaruhi strategi bisnis dan kinerja sektor-sektor ekonomi selama pandemi COVID-19 dan bagaimana kebijakan stimulus fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia mampu meredakan dampak negatif pada perekonomian akibat pandemi COVID-19. Serta bagaimana sektor teknologi dan E-commerce di Indonesia merespons dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19, Apakah transformasi digital dan inovasi di sektor-sektor tertentu dapat dijadikan strategi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia di masa depan. Dengan demikian penelitian ini mempunyai tujuan, Mengetahui perubahan perilaku konsumen yang mempengaruhi strategi bisnis dan kinerja sektor-sektor ekonomi selama

pandemi COVID-19 dan bagaimana kebijakan stimulus fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia mampu meredakan dampak negatif pada perekonomian akibat pandemi COVID-19. Serta mengetahui bagaimana sektor teknologi dan Ecommerce di Indonesia merespons dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19, serta bagaimana transformasi digital dan inovasi di sektor-sektor tertentu dapat dijadikan strategi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia di masa depan.

## **METODE**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian hukum normatif menekankan pada data tidak langsung atau data sekunder. Pendekatan resmi dan terapan yang menekankan pada informasi yang tidak langsung atau informasi tambahan. Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan literatur, yang diikuti dengan analisis deskriptif-kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Pengaturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)**

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan sedemikian rupa mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pengaturan PSBB berdasarkan pada dasar hukum yang ada di Indonesia. Dalam konteks pandemi COVID-19, beberapa peraturan dan undang-undang yang mendasari PSBB antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan karantina kesehatan, mengisolasi individu atau kelompok yang terinfeksi atau berisiko tinggi, serta melakukan pembatasan sosial jika diperlukan. Kewenangan Pemerintah dalam Mengatur Kesehatan Masyarakat: Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam situasi wabah penyakit menular, termasuk kebijakan karantina, isolasi, dan pembatasan sosial. Kewenangan ini memungkinkan pemerintah untuk merespons pandemi COVID-19 dengan langkah-langkah yang dianggap perlu demi melindungi kesehatan masyarakat. Keterkaitan Dampak PSBB dengan Kesehatan dan Ekonomi: PSBB, yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, memiliki dampak langsung pada kesehatan masyarakat dengan mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Namun, dampak PSBB juga turut mempengaruhi laju perekonomian Indonesia. Pembatasan pergerakan dan penutupan bisnis dapat menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, termasuk sektor perdagangan, pariwisata, dan manufaktur. Dengan demikian, pengaturan dan implementasi PSBB sebagai salah satu respons pemerintah terhadap pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus mencari keseimbangan antara melindungi kesehatan masyarakat dan mengelola dampak ekonomi yang dihasilkan oleh tindakan PSBB, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur keekarantinaan kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular: Undang-undang ini mengatur tentang tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, termasuk langkah-langkah pembatasan sosial dalam situasi darurat kesehatan seperti pandemi. Undang-Undang ini memiliki kaitan penting dengan dampak PSBB terhadap laju perekonomian di Indonesia karena mengatur tindakan yang berkaitan dengan pengendalian dan penanganan wabah penyakit menular. Tindakan yang diizinkan dalam undang-undang ini mencakup karantina, isolasi, dan pembatasan sosial. PSBB yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, memiliki dampak langsung pada kesehatan masyarakat dengan mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Namun, dampak PSBB juga turut mempengaruhi laju perekonomian Indonesia. Pembatasan pergerakan dan penutupan bisnis dapat menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, termasuk sektor perdagangan, pariwisata, dan manufaktur.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19: Peraturan Pemerintah ini merinci tindakan pembatasan sosial berskala besar, termasuk wewenang dan prosedur yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam menerapkannya. Ini juga mencakup sanksi bagi individu atau bisnis yang melanggar ketentuan PSBB.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia: Presiden Indonesia memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan yang mendasari pelaksanaan PSBB. Keputusan presiden ini biasanya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menerapkan PSBB di wilayah mereka.
5. Peraturan Daerah: Pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan daerah yang lebih spesifik terkait PSBB di wilayah mereka. Mereka dapat menyesuaikan aturan sesuai dengan kondisi setempat, asalkan sesuai dengan kerangka hukum yang lebih tinggi.

### **Perubahan Perilaku Konsumen Selama Pandemi COVID-19**

Perubahan perilaku konsumen selama pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada strategi bisnis dan kinerja sektor-sektor ekonomi di Indonesia. Inilah beberapa cara perubahan perilaku konsumen memengaruhi berbagai sektor ekonomi:

#### **1. E-Commerce dan Teknologi:**

- a Peningkatan E-commerce  
Konsumen, yang dihadapkan pada pembatasan sosial dan risiko penularan virus, cenderung beralih ke belanja online. Ini telah memicu pertumbuhan yang luar biasa dalam sektor e-commerce. Bisnis yang telah berinvestasi dalam infrastruktur digital, pengiriman, dan pengalaman pelanggan online telah mengalami peningkatan penjualan dan kinerja yang signifikan. Mereka harus terus berfokus pada pengalaman pelanggan, efisiensi rantai pasokan, dan keamanan transaksi online.
- b Teknologi Pengiriman Makanan  
Aplikasi pengiriman makanan juga telah melihat peningkatan pesat selama pandemi. Restoran yang sebelumnya fokus pada makan di tempat harus menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan menawarkan layanan pengiriman atau makanan siap saji. Ini juga menciptakan peluang bagi wirausaha kuliner yang ingin menjual makanan mereka melalui platform ini.
- c Keamanan dan Privasi Online  
Perubahan ini juga telah mendorong konsumen untuk lebih memperhatikan keamanan dan privasi online. Bisnis yang menempatkan prioritas pada perlindungan data pelanggan dan keamanan transaksi online akan memenangkan kepercayaan konsumen.

#### **2. Kesehatan dan Produk Kesehatan**

- a Kebutuhan akan Produk Kesehatan  
Pandemi telah memicu peningkatan permintaan akan produk kesehatan seperti masker, hand sanitizer, vitamin, dan makanan sehat. Bisnis yang dapat merespons dengan cepat dan memenuhi permintaan ini telah mengalami pertumbuhan. Mereka juga harus memantau regulasi yang berkaitan dengan produk-produk kesehatan.
- b Perawatan Kesehatan Online  
Konsultasi medis dan telemedicine telah menjadi lebih umum. Bisnis yang menawarkan layanan kesehatan online mengalami peningkatan permintaan. Mereka harus mematuhi peraturan dan menjaga standar etika yang tinggi dalam memberikan layanan ini.

#### **3. Sektor Pariwisata dan Hiburan**

Penurunan Pariwisata, yaitu dimana pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terpuak selama pandemi. Pembatasan perjalanan internasional, ketidakpastian, dan ketakutan penularan telah mengakibatkan penurunan drastis dalam jumlah wisatawan. Hotel, maskapai penerbangan, agen perjalanan, dan industri hiburan

langsung merasakan dampaknya. Bisnis ini harus mencari cara untuk bertahan, seperti menawarkan penawaran khusus atau berfokus pada pasar lokal.

#### **4. Pangan dan Belanja Rumah Tangga:**

1) Perubahan Pola Konsumsi

Konsumen telah beralih ke belanja dalam jumlah besar, menciptakan lonjakan dalam penjualan makanan dan barang-barang rumah tangga. Bisnis ritel harus mengelola rantai pasokan dan persediaan produk untuk memenuhi perubahan ini. Mereka juga harus memperkuat operasional layanan pengiriman.

2) Peningkatan Belanja Online

Selain itu, konsumen lebih memilih belanja makanan secara online melalui layanan pengiriman. Bisnis yang beroperasi di sektor ini harus memperkuat infrastruktur teknologi mereka untuk menjawab kebutuhan pelanggan.

#### **5. Edukasi dan Kerja dari Rumah:**

1) Pendidikan Online:

Sektor pendidikan melihat pergeseran besar ke pembelajaran online. Institut pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, harus berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi pendidikan. Mereka juga harus mengatasi tantangan aksesibilitas dan kualitas pendidikan online.

2) Kerja dari Rumah:

Model kerja dari rumah telah menjadi norma baru bagi banyak bisnis. Ini telah mengubah kebutuhan terhadap teknologi dan layanan yang mendukung kerja jarak jauh.

Dalam pandemi COVID-19, perubahan perilaku konsumen telah memaksa bisnis untuk beradaptasi dengan cepat. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan merespons tren konsumen adalah kunci keberhasilan bisnis selama dan setelah pandemi. Selain itu, sektor ekonomi yang terdampak harus bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk mencari solusi yang tepat guna memitigasi dampak negatif pandemi dan membangun strategi jangka panjang yang lebih tahan terhadap perubahan.

#### **Kebijakan Stimulus Fiskal dan Moneter**

Kebijakan stimulus fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, seperti program bantuan sosial, insentif pajak, keringanan kredit, dan peningkatan belanja publik, bertujuan untuk meredakan dampak negatif pada perekonomian akibat pandemi COVID-19. Namun, keberhasilan kebijakan ini dalam meredakan dampak bergantung pada beberapa faktor:

1. Efektivitas Implementasi: Penting bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan dengan efisien dan tepat waktu untuk memberikan bantuan kepada individu dan bisnis yang membutuhkan.
2. Alokasi Sumber Daya yang Efisien: Penting untuk memastikan bahwa dana stimulus dialokasikan dengan tepat, mendukung sektor-sektor yang paling terdampak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Dampak Global: Ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi global, sehingga faktor-faktor seperti permintaan global, perdagangan internasional, dan harga komoditas juga dapat memengaruhi dampak pandemi.

Evaluasi kebijakan stimulus fiskal dan moneter memerlukan pemantauan yang cermat terhadap perkembangan ekonomi dan dampak kebijakan tersebut. Keberhasilan dalam meredakan dampak pandemi COVID-19 juga bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta untuk memastikan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah untuk meredakan dampak ekonomi pandemi:

1. Program Bantuan Sosial: Pemerintah menyediakan program bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak, termasuk yang kehilangan pekerjaan. Ini membantu mengurangi beban finansial bagi mereka yang membutuhkan.

2. Insentif Pajak: Insentif pajak diberikan kepada bisnis untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini dapat membantu bisnis mempertahankan pekerjaan dan beradaptasi dengan situasi pandemi.
3. Keringanan Kredit: Bank sentral memberikan keringanan kredit kepada sektor perbankan untuk mendukung likuiditas dan memastikan ketersediaan dana. Hal ini membantu bisnis dan individu mengatasi masalah keuangan akibat pandemi.
4. Peningkatan Belanja Publik: Pemerintah meningkatkan belanja publik untuk merangsang ekonomi. Proyek infrastruktur dan program-program pembangunan lainnya menjadi fokus untuk menciptakan lapangan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Efektivitas dari kebijakan stimulus ini akan bergantung pada beberapa faktor:

1. Implementasi yang Efisien: Penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini secara tepat waktu dan efisien untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.
2. Alokasi yang Tepat: Pengalokasian dana stimulus harus tepat sasaran, mendukung sektor-sektor yang paling terdampak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Dampak Global: Kondisi ekonomi global juga memainkan peran penting. Perdagangan internasional dan permintaan global mempengaruhi ekonomi Indonesia.
4. Koordinasi antara Pihak-pihak Terkait: Koordinasi yang baik antara pemerintah, bank sentral, dan sektor swasta diperlukan untuk memastikan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, penting untuk memahami perubahan perilaku konsumen dan sejauh mana kebijakan stimulus mampu meredakan dampak negatif pada sektor ekonomi. Evaluasi terus-menerus dan adaptasi kebijakan adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini dan membangun ekonomi yang lebih kuat di masa depan.<sup>7</sup>

### **Peran Sektor Teknologi Dan E-Commerce Di Indonesia Dalam Merespons Dan Berkontribusi Terhadap Pemulihan Ekonomi Selama Pandemi COVID-1**

Sektor teknologi dan e-commerce di Indonesia telah memainkan peran kunci dalam merespons dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19. Berikut adalah beberapa cara sektor ini merespons dan berdampak selama pandemi:

1. Peningkatan Penggunaan E-commerce:  
Seiring dengan pembatasan sosial dan penutupan toko fisik, banyak konsumen beralih ke e-commerce untuk memenuhi kebutuhan mereka. Platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak telah mengalami peningkatan pesat dalam aktivitas belanja online. Ini menciptakan peluang bagi bisnis untuk tetap menjual produk mereka secara online. Beberapa bisnis yang awalnya tidak memiliki kehadiran online, terpaksa merespons dengan cepat dengan membuka toko online mereka.
2. Peningkatan Pengiriman Makanan dan Layanan Delivery:  
Aplikasi pengiriman makanan seperti Gojek, Grab, dan GoFood melihat peningkatan signifikan dalam permintaan selama pandemi. Restoran, kafe, dan warung yang sebelumnya hanya fokus pada layanan makan di tempat harus beradaptasi dengan menawarkan layanan pengiriman atau makanan siap saji. Hal ini telah membantu menjaga bisnis mereka tetap beroperasi dan menyediakan pekerjaan bagi pengemudi dan karyawan pengiriman.
3. Digitalisasi UKM:  
Pandemi mendorong banyak UKM untuk mempercepat proses digitalisasi bisnis mereka. Mereka mulai menjual produk dan layanan mereka secara online melalui platform e-commerce dan media sosial. Hal ini memungkinkan UKM untuk terus beroperasi dan menjangkau pelanggan yang lebih luas selama pembatasan sosial.

Aprista Ristyawaty, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam

Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945,” *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3, No. 2, Juni 2020., hal. 242

4. **Pertumbuhan Industri Teknologi Keuangan (Fintech):**  
Fintech mengalami perkembangan pesat selama pandemi. Layanan pembayaran digital, seperti OVO, Gopay, Dana, dan LinkAja, menjadi semakin populer. Mereka memfasilitasi transaksi online, mengurangi kontak fisik, dan membantu konsumen yang menghindari uang tunai. Selain itu, Fintech juga memberikan akses ke layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank.
5. **Peran Penting dalam Pendidikan dan Kerja Jarak Jauh:**  
Sektor teknologi mendukung pendidikan online dan kerja jarak jauh. Platform belajar daring, seperti Ruangguru dan Zenius, serta alat kolaborasi seperti Zoom, membantu siswa dan pekerja untuk terus belajar dan bekerja dari rumah. Hal ini mengurangi dampak penutupan sekolah dan perkuliahan fisik.
6. **Pembayaran Digital:**  
Pembayaran digital dan dompet digital, seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan e-wallet, menjadi lebih umum digunakan selama pandemi. Hal ini membantu mengurangi kontak fisik dan menggalakkan transaksi tanpa uang tunai, yang merupakan langkah penting dalam memitigasi risiko penularan virus.
7. **Pengembangan Solusi Kesehatan dan Keamanan:**  
Beberapa perusahaan teknologi di Indonesia juga terlibat dalam pengembangan solusi teknologi untuk memantau dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Contoh termasuk aplikasi pelacakan kontak (contact tracing) dan alat suhu tubuh otomatis yang digunakan di pintu masuk bisnis dan tempat umum.

Secara keseluruhan, sektor teknologi dan e-commerce di Indonesia telah menjadi elemen vital dalam menjaga perekonomian tetap berjalan selama pandemi COVID-19.<sup>9</sup> Mereka tidak hanya memberikan solusi digital untuk berbagai kebutuhan konsumen dan bisnis, tetapi juga membantu menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketidakpastian ekonomi, dan berperan dalam pemulihan ekonomi yang lebih kuat selama dan setelah pandemi.

### **Transformasi Digital Dan Inovasi Sebagai Strategi Jangka Panjang Untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Indonesia Di Masa Depan**

Transformasi digital dan inovasi di sektor-sektor tertentu dapat menjadi strategi jangka panjang yang efektif untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia di masa depan. Transformasi digital dan inovasi memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan pada perekonomian, terutama dalam menghadapi tantangan seperti pandemi, perubahan iklim, dan perubahan ekonomi global.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa transformasi digital dan inovasi penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia:

1. **Diversifikasi Ekonomi:** Transformasi digital dapat membantu Indonesia untuk diversifikasi ekonominya. Saat ini, Indonesia masih sangat tergantung pada sektor-sektor tradisional seperti pertanian, pertambangan, dan manufaktur. Dengan inovasi teknologi dan digitalisasi, negara dapat mengembangkan sektor-sektor baru seperti teknologi informasi, e-commerce, layanan keuangan digital, dan ekonomi kreatif. Diversifikasi ekonomi akan membantu mengurangi risiko ketika sektor-sektor tertentu terpuak oleh krisis.
2. **Efisiensi dan Produktivitas:** Inovasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Contohnya, otomatisasi proses manufaktur dengan robotika dan penggunaan analitik data untuk pengambilan keputusan dapat mengurangi biaya produksi dan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan barang. Hal ini dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan sektor.
3. **Peningkatan Daya Saing Global:** Dengan inovasi teknologi, perusahaan Indonesia dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Dalam era globalisasi, ekspor dan hubungan perdagangan internasional menjadi semakin penting.

Transformasi digital memungkinkan bisnis untuk mencapai pasar global dengan lebih efisien, meningkatkan pangsa pasar mereka di luar negeri, dan membantu mengurangi ketergantungan pada pasar domestik.

4. Kemampuan Adaptasi Terhadap Krisis: Krisis seperti pandemi COVID-19 mengajarkan pentingnya kemampuan adaptasi. Transformasi digital dapat membantu bisnis untuk lebih cepat beradaptasi terhadap situasi darurat. Bisnis yang telah menerapkan teknologi dan memiliki model bisnis digital dapat beralih ke model bisnis online dan kerja jarak jauh dengan lebih cepat daripada yang bergantung pada operasi fisik.
5. Inklusi Keuangan dan Peningkatan Akses: Inovasi fintech dan perbankan digital membuka akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan formal. Ini membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan memberikan lebih banyak orang akses ke produk dan layanan keuangan yang memungkinkan mereka mengelola keuangan mereka lebih baik, termasuk tabungan, pinjaman, dan asuransi.
6. Pemberdayaan UMKM: Transformasi digital membantu dalam pemberdayaan UMKM dengan memberikan akses ke pasar yang lebih luas. UMKM yang mengadopsi teknologi dapat menjual produk dan layanan mereka secara online, mencapai lebih banyak pelanggan, dan mengelola operasi mereka dengan lebih efisien. Ini memungkinkan pertumbuhan sektor UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.
7. Pengurangan Dampak Lingkungan: Transformasi digital dan inovasi di sektor energi dan transportasi dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan. Pergeseran menuju energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien adalah bagian penting dari agenda pembangunan berkelanjutan yang dapat membantu mengatasi perubahan iklim.
8. Peningkatan Infrastruktur Digital: Investasi dalam infrastruktur digital, termasuk jaringan internet yang cepat dan andal, adalah landasan utama bagi transformasi digital. Infrastruktur digital yang kuat akan memastikan akses yang lebih luas ke teknologi digital, menghubungkan daerah pedesaan dengan perkotaan, dan mempercepat penyebaran inovasi teknologi.
9. Peningkatan Keterampilan Sumber Daya Manusia: Transformasi digital memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang relevan. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan digital menjadi penting. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam teknologi adalah kunci keberhasilan transformasi digital.

Dengan implementasi transformasi digital dan inovasi di sektor-sektor utama, Indonesia dapat memperkuat ketahanan ekonominya dengan mengurangi kerentanan terhadap krisis dan membangun fondasi untuk pertumbuhan berkelanjutan di masa depan. Hal ini melibatkan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mendorong inovasi, meningkatkan akses teknologi, dan memperkuat infrastruktur digital.

## **SIMPULAN**

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), diatur oleh undang-undang Indonesia, memberikan kewenangan pemerintah untuk tindakan karantina saat wabah penyakit, khususnya dalam pandemi COVID-19. PSBB mempengaruhi perilaku konsumen, memunculkan tren belanja online, pengiriman makanan, dan meningkatkan keamanan online. Pemerintah merespons dampak ekonomi dengan stimulus fiskal dan moneter, termasuk bantuan sosial, insentif pajak, dan peningkatan belanja publik. Sektor Teknologi dan E-Commerce berperan vital dalam menjaga ekonomi, melalui ecommerce, pengiriman makanan, dan solusi online. Transformasi digital, inovasi, dan kerja sama pemerintah-swasta-masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia, diversifikasi, daya saing global, inklusi keuangan, dan pengurangan dampak lingkungan.

Investasi di infrastruktur digital dan pendidikan menjadi langkah krusial untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Einstein, T., Helmi, M. I., & Ramzy, A. (2020). Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(7).  
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15826>
- Indonesia, Selama Pandemi Covid 19 sebagai Entrepreneur Modern dan Pengaruhnya Terhadap Bisnis Offline. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Jumanis) Prodi Kewirausahaan*, 2(2).
- Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (2020).
- Menteri Kesehatan RI. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19). *Parallax*.
- Nanang, A., & Viana, E. O. (2020). Strategi Bertahan Perusahaan di masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Penalaran Dan Penelitian Nusantara*, 1(1).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. *Website*, 2019.
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 9, BN.2020/NO.326.**
- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2020*, 2019(1).
- Permen Kesehatan. (2020). Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2).  
<https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249>
- Sudaryono, Efana Rahwanto, R. K. (2020). E-commerce Dorong Perekonomian
- Sutrisni Putri, A. (2020). Apa itu Virus Corona? *02-Mei-2020*.
- Syamsu, R. F. (2021). Aktivitas Pasar Modal Indonesia Di Era Pandemi. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2.
- Telaumbauna, D. (2020). Tinjauan Yuridis Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Covid-19. *Jurnal Education and Development*, 8(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Setjen DPR RI (2018).
- Widyaningrum, G. L. (2020). WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya? *National Geographic Indonesia*.